

Tingkat Penerimaan Petani Kelapa Sawit Rakyat terhadap Rancangan Penyuluhan Administrasi Kelompok Tani di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Annisa Fitria Asti^{1*}, Liza Devita², Silvia Nora¹

¹Penyuluhan Perkebunan Presisi, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

²Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

*Email korespondensi: annisafitriasti28@gmail.com

Abstrak

Kelompok tani merupakan kelembagaan strategis dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Namun, lemahnya pengelolaan administrasi kelompok tani menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas kelembagaan petani kelapa sawit di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Sesuai amanat Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dan Permentan No. 27 Tahun 2023 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, penguatan kapasitas administrasi kelompok tani merupakan prioritas yang harus diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menyusun rancangan penyuluhan pengelolaan administrasi kelompok tani kelapa sawit, (2) menganalisis tingkat penerimaan petani terhadap rancangan penyuluhan yang meliputi aspek materi, metode, media, volume, lokasi, waktu, dan biaya. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Mei 2026 menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel berjumlah 39 pengurus kelompok tani yang dipilih secara purposive dari 13 kelompok tani di tiga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan penyuluhan yang disusun diterima dengan baik oleh sasaran, dengan total persentase penerimaan sebesar 84,67% berkategori Sangat Menerima. Materi penyuluhan memperoleh persentase tertinggi (86,37%), disusul lokasi (86,06%), volume (85,47%), biaya (85,13%), waktu (84,41%), media (83,60%), dan metode (82,36%). Temuan ini menunjukkan bahwa rancangan penyuluhan berbasis kebutuhan petani kelapa sawit yang selaras dengan regulasi Ditjen Perkebunan efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani.

Kata kunci: Administrasi kelompok tani, Kelapa sawit, Penyuluhan pertanian, Rancangan penyuluhan, Regulasi perkebunan

Abstract

Farmer groups are strategic institutions in smallholder palm oil plantation development. However, weak administrative management of farmer groups is a major obstacle that hinders the effectiveness of palm oil farmer group institutions in Stabat District, Langkat Regency. In accordance with the mandate of Ministerial Regulation No. 67/2016 on Farmer Institution Guidance and No. 27/2023 on Strengthening Agricultural Extension Functions, strengthening the administrative capacity of farmer groups is a priority that must be realized through systematic extension activities. This study aimed to (1) develop an extension design for palm oil farmer group administration management, and (2) analyze farmer acceptance levels toward the extension design covering seven aspects: material, method, media, volume, location, time, and cost. The study was conducted from January to May 2026 using a descriptive quantitative method. Samples consisted of 39 farmer group administrators selected purposively from 13 farmer groups across three villages. Results showed that the extension design was well-received by the target audience, with an overall acceptance percentage of 84.67%, categorized as Very Accepting. Extension material obtained the highest percentage (86.37%), followed by location (86.06%), volume (85.47%), cost (85.13%), time (84.41%), media (83.60%), and method (82.36%). These findings indicate that a needs-based palm oil farmer extension design aligned with the Directorate General of Plantation regulations is effective in strengthening farmer group institutional capacity.

Keywords: Extension design, Farmer group administration, Palm oil, Plantation regulation, Smallholder farmers

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas areal mencapai lebih dari 16 juta hektar, di mana sekitar 41% di antaranya dikelola oleh petani swadaya atau perkebunan rakyat (BPS Kabupaten Langkat, 2024). Besarnya kontribusi petani rakyat dalam produksi kelapa sawit nasional menempatkan penguatan kapasitas kelembagaan petani sebagai salah satu prioritas pembangunan perkebunan.

Kelompok tani merupakan kelembagaan primer yang berperan sebagai wadah bagi petani untuk belajar bersama, bekerja sama, dan meningkatkan efisiensi usaha tani secara kolektif. Berdasarkan Permentan No 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, kelompok tani didefinisikan sebagai kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Fungsi optimal kelompok tani menjadi prasyarat penting bagi petani kelapa sawit rakyat dalam mengakses layanan pemerintah, permodalan, subsidi sarana produksi, serta program pembinaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Bun).

Administrasi kelompok tani mencakup pencatatan buku anggota, daftar hadir, notulen rapat, buku kas, dan rencana kerja kelompok (RDK/RDKK). Tertibnya administrasi kelompok menjadi syarat wajib bagi petani kelapa sawit rakyat dalam mengikuti program strategis pemerintah, antara lain Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta program-program fasilitasi Ditjen Bun lainnya. Prasetyowati *et al.*, (2025) menegaskan bahwa pengelolaan administrasi yang sistematis dan terstruktur menjadi syarat mutlak dalam mendukung efektivitas kegiatan kelompok tani, termasuk akses terhadap permodalan dan program subsidi pertanian.

Kecamatan Stabat sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya yang besar. Namun, hasil identifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kelompok tani di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Minimnya keterampilan pengurus dalam menerapkan manajemen administrasi yang tertib menyebabkan pencatatan kelompok tidak konsisten, laporan pertanggungjawaban lemah, dan kepercayaan anggota terhadap kepengurusan cenderung

rendah, yang pada akhirnya menghambat akses petani terhadap program-program strategis Ditjen Bun.

Permentan No 27 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian tahun 2023, menegaskan bahwa penyuluh pertanian berperan sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan kapasitas petani, termasuk dalam aspek manajerial dan kelembagaan. Program Kecamatan Stabat juga telah menetapkan target peningkatan kapasitas administrasi kelompok tani dari 43% menjadi 60%, namun kegiatan penyuluhan khusus mengenai administrasi kelompok belum pernah dilaksanakan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan penyuluhan pengelolaan administrasi kelompok tani kelapa sawit yang tepat sasaran dan menganalisis tingkat penerimaan petani terhadap rancangan tersebut.

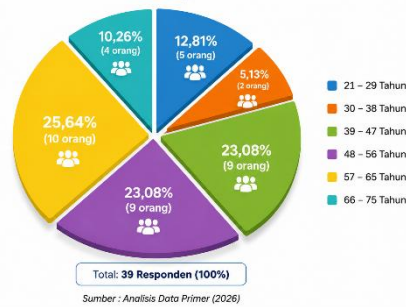
METODE

Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Mei 2026 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa kelompok tani komoditi kelapa sawit di wilayah tersebut cukup aktif namun pengelolaan administrasinya belum optimal, serta belum pernah mendapatkan penyuluhan khusus mengenai administrasi kelompok. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 39 orang pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dari 13 kelompok tani di tiga desa, yaitu Desa Pantai Gemi, Desa Ara Condong, dan Desa Mangga, dengan masing-masing 3 responden per kelompok tani (Sugiyono, 2022).

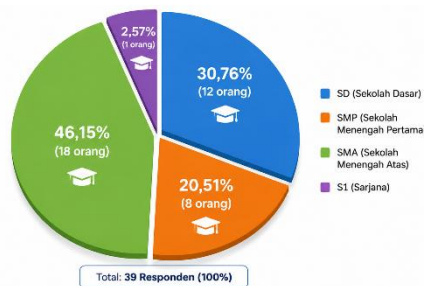
Identifikasi potensi wilayah (IPW) dilakukan menggunakan teknik *Rapid Rural Appraisal* (RRA) melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus (Syahza, 2021). Perancangan penyuluhan mengacu (Permentan No 47 tentang penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2016), yang mencakup penetapan tujuan penyuluhan, serta penetapan komponen rancangan meliputi materi, metode, media, volume, lokasi, waktu, dan biaya. Pengukuran tingkat penerimaan rancangan penyuluhan menggunakan instrumen kuesioner dengan Skala Likert skor 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* dengan $r_{hitung} > r_{tabel}$ nilai 0,514, $\alpha = 0,05$ (Soesana et al., 2023) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* ($>0,600$). Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

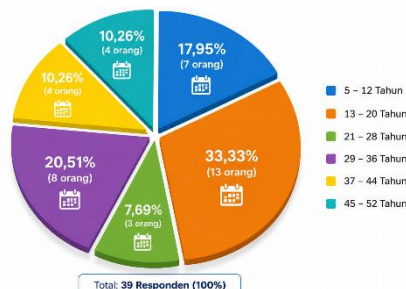
Karakteristik Sasaran



Gambar 1. Karakteristik berdasarkan umur



Gambar 2. Karakteristik berdasarkan pendidikan



Gambar 3. Karakteristik berdasarkan pengalaman berusahatani

Dewi *et al.*, (2023) menyatakan bahwa Karakteristik responden merupakan kondisi internal yang dimiliki oleh narasumber pada penelitian yang telah dilakukan. Karakteristik sasaran tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan rancangan penyuluhan yang sesuai dengan kondisi kelompok tani. Umur secara konseptual menunjukkan bahwa bertambahnya usia seseorang berhubungan dengan penurunan tingkat produktivitas. Ini sejalan dengan kondisi biologis manusia, di mana seiring dengan bertambahnya usia, fungsi sistem kekebalan, keseimbangan hormon, serta kemampuan saraf sensorik, motorik, dan neurologis seseorang akan mengalami penurunan. Selain itu, lama pengalaman kerja juga diyakini memberi dampak pada produktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas

(Febianti et al., 2023). Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta dukungan pengalaman kerja, maka pekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan (Herawati dan Sasana, 2013 dalam Febianti *et al.*, 2023).

Tingkat penerimaan rancangan penyuluhan

Tingkat penerimaan pengurus kelompok tani kelapa sawit terhadap rancangan penyuluhan diukur melalui tujuh aspek. Rekapitulasi hasil penilaian seluruh aspek disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Penerimaan Rancangan Penyuluhan

No	Variabel	Item	Total Skor	Skor Maks	Persentase (%)	Kategori
1	Materi Penyuluhan	7	1.179	1.365	86,37	Sangat Menerima
2	Metode Penyuluhan	10	1.626	1.950	82,36	Menerima
3	Media Penyuluhan	9	1.461	1.755	83,60	Menerima
4	Volume Penyuluhan	6	1000	1.170	85,47	Sangat Menerima
5	Lokasi Penyuluhan	6	1.007	1.170	86,06	Sangat Menerima
6	Waktu Penyuluhan	5	823	975	84,41	Sangat Menerima
7	Biaya Penyuluhan	4	664	780	85,13	Sangat Menerima
Total			7.760	9.165	84,67	Sangat Menerima

Sumber: Analisis Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 1, rancangan penyuluhan secara keseluruhan memperoleh total skor 7.760 dari skor maksimum 9.165 (84,67%) dengan kategori Sangat Menerima. Lima variabel berada pada kategori Sangat Menerima dan dua variabel pada kategori Menerima. Tidak ada variabel yang berada di bawah kategori Menerima, menunjukkan bahwa seluruh komponen rancangan penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh pengurus kelompok tani kelapa sawit di Kecamatan Stabat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dewi *et al.*, (2024) bahwa kegiatan penyuluhan berpengaruh yang signifikan disebabkan karena metode penyuluhan yang efektif.

Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan memperoleh persentase tertinggi (86,37%) dengan kategori Sangat Menerima. Materi mencakup fungsi dan peran kelompok tani kelapa sawit, tugas pengurus, serta tata cara penyusunan dokumen administrasi kelompok tani, meliputi buku anggota, daftar hadir, notulen rapat, dan buku kas, Kelengkapan dokumen-dokumen tersebut menjadi persyaratan wajib bagi petani kelapa sawit rakyat yang hendak mengakses Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program fasilitasi lain dari Ditjen Bun.

Item dengan skor tertinggi adalah materi yang memberikan wawasan tentang pengelolaan administrasi kelompok (88,2%), hal ini sejalan dengan prinsip penyuluhan

partisipatif yang menekankan bahwa materi harus bersifat kontekstual dan dapat langsung diterapkan (Bachtiar et al., 2025). Hal ini juga di dukung oleh pendapat Riswani *et al.*, (2023) menyatakan bahwa materi penyuluhan harus disajikan dalam bentuk pesan yang sesuai kebutuhan sasaran, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman yang relevan.

Metode penyuluhan

Metode penyuluhan yang digunakan terdiri dari demonstrasi cara dan kunjungan/monitoring, dengan persentase gabungan 82,36% berkategori Menerima. Metode demonstrasi memperoleh persentase 85,23%, dengan skor tertinggi pada item kesesuaian metode dengan karakteristik sasaran (89,7%). Tingginya penerimaan terhadap metode demonstrasi selaras dengan pernyataan Dewi *et al.*, (2024) bahwa demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian yang efektif karena memperlihatkan inovasi baru kepada sasaran secara nyata dan konkret. Metode ini sangat relevan untuk sasaran petani kelapa sawit yang sebagian besar merupakan petani dewasa berpengalaman yang lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung dibandingkan ceramah teoritis semata.

Metode kunjungan/monitoring memperoleh persentase 81,53%, sedikit lebih rendah dibandingkan demonstrasi. Meskipun demikian, pendampingan lapangan dinilai efektif dalam membantu peserta menyelesaikan kendala teknis penerapan administrasi (85,1%). Perbedaan persentase antara kedua metode ini sejalan dengan Mardikanto, (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kesinambungan interaksi antara penyuluh dan sasaran, sehingga frekuensi kunjungan yang rutin akan meningkatkan efektivitas adopsi inovasi jangka panjang. Dalam konteks regulasi, Permentan No. 27 Tahun 2023 menegaskan peran penyuluh sebagai pendamping petani dalam penerapan inovasi, termasuk pengelolaan administrasi kelompok tani.

Media penyuluhan

Media penyuluhan terdiri dari *leaflet* dan benda sesungguhnya berupa format buku administrasi kelompok tani, dengan persentase gabungan 83,60% berkategori Menerima. Media benda sesungguhnya memperoleh persentase lebih tinggi (86,79%) dibandingkan *leaflet* (80,41%). Tingginya penerimaan terhadap benda sesungguhnya menunjukkan bahwa penggunaan contoh dokumen administrasi nyata sangat efektif bagi petani kelapa sawit, karena mereka dapat langsung melihat, memegang, dan mempraktikkan pengisian format buku administrasi yang diwajibkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemilihan media

penyuluhan menurut Rustandi dan Warnaen, (2019) yang menekankan keluwesan, kepraktisan, dan efektivitas media.

Item skor terendah pada leaflet adalah kejelasan gambar/ilustrasi (77,4%), mengindikasikan bahwa tampilan contoh format administrasi kelapa sawit dalam leaflet perlu diperjelas. Menurut Kustanti *et al.*, (2020) menyatakan bahwa leaflet merupakan media yang paling disukai petani karena dapat menyampaikan informasi secara singkat dan padat, namun perlu memperhatikan kejelasan tampilan agar dapat digunakan sebagai panduan praktis pengisian dokumen administrasi.

Volume, Lokasi, Waktu, dan Biaya penyuluhan

Volume penyuluhan sebanyak 2 kali pertemuan memperoleh persentase 85,47% (Sangat Menerima). Skor tertinggi pada item waktu diskusi yang memadai (89,2%) menunjukkan bahwa pembagian pertemuan pertama untuk penyampaian konsep dan pertemuan kedua untuk praktik langsung memberikan ruang yang cukup bagi petani kelapa sawit untuk memahami dan menerapkan materi administrasi. Meskipun demikian, mengingat kompleksitas persyaratan administrasi dalam program PSR dan fasilitasi Ditjen Bun, disarankan kegiatan penyuluhan dilanjutkan secara berkala oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat.

Lokasi penyuluhan di rumah salah satu pengurus kelompok tani memperoleh persentase tertinggi (86,06%) dengan kategori Sangat Menerima. Item kesesuaian lokasi memperoleh skor 90,8%, menunjukkan bahwa pemilihan lokasi di lingkungan komunitas petani kelapa sawit berhasil menciptakan suasana belajar yang kondusif dan kekeluargaan. Waktu penyuluhan pukul 10.00 WIB berdasarkan kesepakatan bersama memperoleh 84,41% (Sangat Menerima), dengan skor tertinggi pada item jadwal yang tidak mengganggu aktivitas kebun (86,7%). Biaya penyuluhan dari swadaya penyaji memperoleh 85,13% (Sangat Menerima), dengan item media dan bahan yang sesuai biaya memperoleh skor tertinggi (87,2%). Penggunaan dana swadaya memberikan contoh bahwa pemberdayaan kelompok tani kelapa sawit dapat dilakukan secara mandiri dan efisien, sejalan dengan tujuan penguatan kemandirian kelembagaan petani sesuai Permentan No. 67 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi implementasi kebijakan Ditjen Perkebunan dalam penguatan kelembagaan petani kelapa sawit rakyat. Tingginya penerimaan petani terhadap seluruh aspek rancangan penyuluhan (84,67%) menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berbasis kebutuhan yang terstruktur sesuai Permentan No. 47

Tahun 2016 efektif sebagai instrumen peningkatan kapasitas administrasi kelompok tani. Tertibnya administrasi kelompok tani tidak hanya meningkatkan tata kelola internal, tetapi juga membuka akses petani kelapa sawit rakyat terhadap program-program strategis pemerintah seperti PSR, subsidi pupuk, dan kredit usaha tani yang mensyaratkan kelengkapan dokumen administrasi kelompok.

Temuan ini mendukung urgensi sinergi antara penyuluh pertanian, BPP Kecamatan, dan Ditjen Bun dalam menyusun program pembinaan kelembagaan petani kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan Zahra *et al.*, (2024)(Abdullah *et al.*, 2021) mengoptimalkan fungsi kelompok tani membutuhkan pendampingan intensif dari penyuluh yang berperan sebagai motivator, edukator, fasilitator, dan inovator. Ke depan, rancangan penyuluhan ini dapat dijadikan model acuan bagi BPP Kecamatan Stabat dan wilayah lain dengan karakteristik serupa dalam memperkuat kapasitas administrasi kelompok tani kelapa sawit rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rancangan penyuluhan pengelolaan administrasi kelompok tani kelapa sawit di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah dan karakteristik sasaran, mencakup tujuh komponen utama: materi yang berfokus pada dokumen administrasi yang diwajibkan regulasi Ditjen Bun, metode demonstrasi cara dan kunjungan/monitoring, media leaflet dan benda sesungguhnya berupa format buku administrasi, volume 2 kali pertemuan, lokasi di rumah pengurus kelompok tani, waktu berdasarkan kesepakatan bersama, dan biaya dari dana swadaya.

Tingkat penerimaan pengurus kelompok tani terhadap rancangan penyuluhan mencapai 84,67% (Sangat Menerima), dengan materi penyuluhan memperoleh persentase tertinggi (86,37%) dan metode penyuluhan terendah (82,36%), namun seluruh variabel berada pada kategori Menerima hingga Sangat Menerima. Temuan ini menunjukkan bahwa rancangan penyuluhan berbasis kebutuhan petani kelapa sawit rakyat yang selaras dengan regulasi Permentan No. 67 Tahun 2016 dan Permentan No. 27 Tahun 2023 efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Disarankan agar BPP Kecamatan Stabat menjadikan rancangan ini sebagai program prioritas pembinaan kelembagaan kelompok tani kelapa sawit secara berkelanjutan, serta mendorong petani untuk melengkapi dokumen administrasi kelompok sebagai syarat akses program PSR dan fasilitasi Ditjen Perkebunan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif* (N. Saputra & A. K. Dewi (eds.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Bachtiar, E. E., Tapi, T., Saputra, H., Budicahyono, M. E., & Konyep, E. (2025). Penyuluhan Pertanian: Pendekatan, Metode dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Pertanian Dalam Mendukung Swasembada Pangan Program Studi Penyuluhan Program Studi Penyuluhan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. *Journal of Sustainable Agriculture Extension*, 3(1), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47687/JoSAE.v3i1.1364>
- BPS Kabupaten Langkat. (2024). diakses 1 Mei 2026
- Dewi, F. N. K., Oktaviani, D., Fadillah, W. N., Safitri, M. N., & Umiyana, A. A. (2024). Pengaruh penyuluhan dengan metode demonstrasi terhadap peningkatan pengetahuan dan minat adopsi teknologi eco enzyme. *Science Innovation and Technology (SINTECH)*, 4, 32–37. <https://doi.org/DOI: 10.47701>
- Dewi, R. W. K., Fibriningtyas, A., & Prasetyo, H. (2023). Peran Penyuluh Terhadap Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani. 7, 493–504. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.000.00.0>
- Febianti, A., Shulthoni, M., Masrur, M., & Aris, M. (2023). *Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja di Indonesia*. 2(1), 198–204.
- Kustanti, E., Rusmana, A., & Hadisiwi, P. (2020). Penggunaan Media Informasi Oleh Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 29, 51–63. <https://doi.org/10.21082/jpp.v29n2.2020.p51>
- Mardikanto, T. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian* (S. Anantayu, K. Saddhono, & Suwanto (Eds.)). LPP dan UNS Press.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, 36 (2016).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, 1 (2023).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. (2016).
- Prasetyowati, R. E., Ningsih, D. H., Anwar, M., Ahmadi, R., & Rinjani, U. G. (2025). Pelatihan Administrasi Pembukuan Sederhana Melalui Pendekatan Workshop di Kelompok Tani Ternak (KTT) Berlian Desa Sukadana Pendahuluan. *Dharma Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna*, 1(4). <https://doi.org/10.63982/dharmabakti.h75cvk19>
- Riswani, Oktarina, S., Rosana, E., & Thirtawati. (2023). *Modul Penyuluhan Pertanian*. Jurusan Sosek FP Unsri.
- Rustandi, Y., & Warnaen, A. (2019). *Media Penyuluhan*. Pusat Pendidikan Pertanian.

Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Kuswandi, A. F. S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (A. Karim (Ed.)). Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Sutopo (Ed.)). ALFABETA, cv.

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian* (A. Syahza (Ed.)). UR Press.

Zahra, S. A., Pratama, A. J., & Situmeang, W. H. (2024). *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Upaya Pengembangan Usahatani Urban Farming (Kasus Kelompok Tani Mugi Lestari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)*. 21(2), 212–224.